



RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023



📍 Jl. Pahlawan No. 5, Magetan

☎️ (0351) 891 321

🌐 www.dpmpstp.magetan.go.id

✉️ dpmpstp@magetan.go.id / dpmpstpmagetan@gmail.com

📘 [dpmpstp.magetan](https://www.facebook.com/dpmpstp.magetan)

📷 [dpmpstp_magetan](https://www.instagram.com/dpmpstp_magetan)



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADOU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan Nomor 5 Magetan Kode pos 63318
Telepon (0351) 891321 SMS Center 08113321222
Website : <http://dpmpmsp.magetan.go.id> Email : dpmpmsp@magetan.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN**

Nomor : 188/ 17 /Kept/403.117/2022

TENTANG

**RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2023, perlu disusun Rencana Kerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1981);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 08 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan tahun 2005 – 2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2009 nomor 8);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 75);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor

- 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 08);
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 32);

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Kesatu : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.
- Ketiga : Rencana Kerja Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 31 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 198809 2 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

Tujuan Rencana Kerja ini dibuat sebagai arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ini secara umum belum mampu memberikan atau menyajikan bentuk terbaik, namun kami telah berupaya semaksimal mungkin menyusun laporan ini sehingga dapat memberikan gambaran rencana kegiatan Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Magetan, 31 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 198809 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	23
2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	25
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	27
3.3. Program dan Kegiatan	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	30
BAB V PENUTUP.....	31

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkatan Perangkat Daerah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dinamakan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renja Perangkat Daerah ini menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antarperencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1981);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 08 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan tahun 2005 – 2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2009 nomor 8);
28. Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman

- Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 75);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
 30. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 08);
 31. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 32);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang di operasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung system pengawasan dan pengendalian yang efektif.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2022 adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan yang terukur.
- b. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program kegiatan.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumberdaya dalam pelaksanaan program kegiatan.
- d. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas program kegiatan.
- e. Memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu selama 1 (satu) tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN		
1.1.	Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
1.3	Maksud dan Tujuan	Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah
1.4	Sistematika Penulisan	Berisi tentang sistematika penyajian / penyusunan RKPD
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	Mencakup evaluasi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/ pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja, keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu dan tahun berjalan terhadap RPJMD.
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan SPM, maupun terhadap indikator kinerja kunci (IKK)
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Berisikan permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam pelayanan tugas dan fungsi Perangkat daerah, serta isu isu strategis lainnya
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	Hasil kajian terhadap program kegiatan yang diusulkan para masyarakat dan pengumpulan informasi dan pengamatan lapangan
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
3.1	Telaah terhadap Kebijakan Nasional	Telaah terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (pencapaian IKU dan IKD tahun direncanakan)
3.3	Program Kegiatan	Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun direncanakan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

	Memberikan informasi program dan kegiatan tahun rencana, target capaian kinerja beserta pagu indikatifnya
--	---

BAB V PENUTUP

	Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2023, yang tersusun atas dasar dukungan dan partisipasi dari berbagai komponen masyarakat (stakeholder) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Magetan.
--	---

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja periode Tahun 2023 ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2021. Berbagai kegiatan teoritis dan praktis dilakukan demi sempurnanya rencana kerja tersebut. Rencana Kerja ini di selaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan dalam mencapai visi dan misi yang telah disusun. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Magetan dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan yang merupakan gambaran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) dalam periode tertentu. Selama periode Tahun Anggaran 2021, besarnya capaian program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Magetan dalam Tabel T.C 29 sebagaimana berikut. :

NO	Tujuan	Sesman	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program/kegiatan, Kegiatan (ortup), Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SSGD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja 2021 s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SSGD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d tahun 2021 (%)	Unit OPD Penanggung Jawab															
						7			8			9			10								11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7x100			14 = 6 + 12			15 = 14/5 x100		
						K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp						K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp
5	6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16																
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x100	16																					
-1	-2	-3	-4	-5																																	
		1.1.3	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Persentase pencapaian dan pengawasan bidang pertambangan. %	Prosen	20.000.000	0	Prosen	-	-7	-8																		-19								
		1.1.3.1	Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian c	Jumlah monitoring yang dilaksanakan. Kegiatan	12	Kegiatan	20.000.000	0	Kegiatan	-	-																										
Meningkatkan kegiatan investasi	Meningkatnya investasi	2.18.02	PROGRAM PEMBANGUNAN PELANJUTAN AS MODAL	Persentase realisasi kegiatan	90	Persen	1.000.000.000	0	Persen	0	0	Persen	0	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0							
		2.18.02	Penetapan Fasilitas Investasi Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Fasilitas Investasi Bidang Penanaman Modal. dokumen	5	Dokumen	375.000.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0							
		2.18.02	Penetapan kuota bidang Penanaman Modal Fasilitas Investasi	Jumlah Dokumen E-sjmn Penanaman Modal. Dokumen	4	Dokumen	300.000.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0							
			Evaluasi Risiko dalam Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Evaluasi Risiko Penanaman Modal. dokumen	1	Dokumen	75.000.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0							
			Pembuatan Perencanaan Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Investasi Kabupaten/Kota. dokumen	4	Dokumen	625.000.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0							
			Penyediaan Peta Potensi dan Bidang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi yang disusun. Dokumen	2	Dokumen	350.000.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0							
			Penyusunan Rencana Usaha Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan penanaman modal. Dokumen	2	Dokumen	275.000.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0							
Meningkatkan kegiatan investasi	Meningkatnya investasi	2.18.02	PROGRAM PENGENDALIAN PELANJUTAN AS MODAL	Persentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal	90	Persen	1.240.000.000	0	Persen	372.210.650	0	Persen	-	0	Persen	-	10	Persen	4.605.600	90	Persen	106.714.700	100	Persen	111.320.300	111,11	29,91	100	Persen	111.320.300	111,1	9					
		2.18.02	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal. dokumen	72	Dokumen	1.240.000.000	0	Dokumen	372.210.650	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	4.605.600	12	Dokumen	106.714.700	12	Dokumen	111.320.300	50,00	29,91	12	Dokumen	111.320.300	17	9					
		2.18.05	Sosialisasi dan Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen sosialisasi pengendalian penanaman modal. dokumen	36	Dokumen	175.000.000	0	Dokumen	50.757.500	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	-	0	0	0	0	0					
		2.18.05	Sosialisasi dan Promosi Penanaman Modal	Jumlah peserta raker dan bintang an. orang	300	Orang	755.000.000	0	Orang	22.199.050	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	4.605.600	108	Orang	94.294.700	108	Orang	98.900.300	100,00	43,53	108	Orang	98.900.300	36	13					
		2.18.05	Sosialisasi dan Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen sosialisasi pengendalian penanaman modal. dokumen	36	Dokumen	310.000.000	0	Dokumen	94.263.500	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	12	Dokumen	12.420.000	12	Dokumen	12.420.000	100,00	13,18	12	Dokumen	12.420.000	33	4					

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja & Tujuan, Satuan, Program/Outcome, Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Realisasi SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Realisasi SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Realisasi SKPD sampai dengan Realisasi SKPD Tahun Lela			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Pemanggang Jawab						
						5			6			7			8			9			10			11			12 = 8/9*10*11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5 *100		
						K	Setoran	Rp	K	Setoran	Rp	K	Setoran	Rp	K	Setoran	Rp	K	Setoran	Rp	K	Setoran	Rp	K	Setoran	Rp	K	Setoran	Rp		K	Setoran	Rp	K	Setoran	Rp
						Volume			Volume			Volume			Volume			Volume			Volume			Volume			Volume				Volume			Volume		
	-1	-2	-3	-4	-5			-18				-7		-8																					-19	
	Meningkatnya tingkat pelayanan terpadu satu pintu yang prima.		1.2.1	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Procentase pelayanan yang sesuai standar Operasional Prosedur. %	90	Persan	1.790.000.000	40%	Persan	1.195.016.417																								DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			1.2.1.1	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan. Dokumen	6500	Dokuman	800.000.000	10916	Dokuman	955.272.828																								DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			1.2.1.2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dokumen	48	Dokuman	220.000.000	25	Dokuman	73.349.691																									DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			1.2.1.3	Penyelenggaraan Forum Komunikasi PSP	Jumlah anggota forum komunikasi PSP. Orang	60	Orang	90.000.000	0	Orang	0																									DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			1.2.1.4	Penyediaan Prosedur Perizinan dan Penyelenggaraan Pelayanan	Jumlah dokumen penyediaan prosedur dan peningkatan pelayanan. Dokumen	2	Dokuman	50.000.000	0	Dokuman	0																									DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			1.2.1.5	Pengujian Mutu Pelayanan Publik	Jumlah kegiatan mutu pelayanan. Kegiatan	2	Kegiatan	130.000.000	2	Kegiatan	166.395.900																									DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			1.2.1.6	Penyelenggaraan Mel Pelayanan Publik	Procentase pelayanan publik yang ditanggapi. Persan	80	Persan	500.000.000		Persan																										DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			1.2.3	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Procentase penguatan masyarakat yang terintegrasi. %																															DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			1.2.3.1	Pembantuan unit bisnis penguatan masyarakat	Procentase penguatan masyarakat yang ditanggapi. %	100	Persan	30.000.000		Persan																										DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Meningkatkan kegiatan investasi	Meningkatnya realisasi investasi	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PERANAMAN MODAL	Pemertasaan pelayanan yang sesuai standar Operasional Prosedur.	100	Persan	2.720.000.000		Persan	124.751.400	25	Persan	-	25	Persan	30.213.250	25	Persan	7.734.000	25	Persan	85.488.670	100	Persan	123.435.920	100,00	98,95	100	Persan	123.435.920	100		5	DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2.18.04	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Pemasangan Modal yang Menjadikan Kawasan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan di kawasan. Bulan	36	Bulan	2.720.000.000		Bulan	124.751.400	3	Bulan	-	3	Bulan	30.213.250	3	Bulan	7.734.000	3	Bulan	85.488.670	12	Bulan	123.435.920	100,00	98,95	12	Bulan	123.435.920	33		5	DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2.18.04	Pelayanan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berteknologi Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan dan jumlah kegiatan mutu pelayanan publik. Dokumen	12.500	Dokuman	1.450.000.000		Dokuman	95.395.250	1312	Dokuman	-	2271	Dokuman	24.122.002	583	Dokuman	2.739.000	977	Dokuman	67.360.500	5.143	Dokuman	94.231.500	128,98	98,78	5.143	Dokuman	94.231.500	41		6	DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

NO	Tujuan	Sesman	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/Output, Kegiatan (terutama), Sub Kegiatan	Target Renstra SIGPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SIGPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SIGPD sampai dengan Renja SIGPD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja SIGPD Tahun Berjalan Tahun 2021 yang divaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SIGPD yang divaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang divaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SIGPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SIGPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SIGPD s/d tahun 2021 (%)	Unit OPD Penanggung Jawab										
						5		6			7			8			9			10			11			12 = 8*9+10*11						13 = 12/7*100			14 = 6 + 12			15 = 14/5 *100			
						K	Rp	Volume	Setoran	Rp	K	Setoran	Rp	Volume	Setoran	Rp	Volume	Setoran	Rp	Volume	Setoran	Rp	Volume	Setoran	Rp	Volume						Setoran	Rp	K	Rp	Volume	Setoran	Rp	K	Rp	
						Volume	Setoran	Volume	Setoran	Rp	Volume	Setoran	Rp	Volume	Setoran	Rp	Volume	Setoran	Rp	Volume	Setoran	Rp	Volume	Setoran	Rp	Volume						Setoran	Rp	K	Rp	Volume	Setoran	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5		72	Dokuman	255.000.000				24	Dokuman	29.356.150	0	Dokuman	-	12	Dokuman	6.081.250	6	Dokuman	4.995.000	6	Dokuman	18.128.170	24	Dokuman	29.204.420	100.00	99.48	24	Dokuman	29.204.420	33	11	DIRAS PERBANKAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
						36	Bulan	290.000.000				0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	Bulan	-	-	-	DIRAS PERBANKAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
						100	Orang	725.000.000				0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	Orang	-	-	-	DIRAS PERBANKAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
			1.2.2	Program Pengembangan Database data Informasi	Prosentase data dan informasi yang dibenamkan. %	90	Persen	950.000.000	40	Persen	510.796.030																										DIRAS PERBANKAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
			1.2.2.1	Pengalokasian Dana Penunjang Modal Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah data yang dibenamkan. Dokuman	18	Dokuman	30.000.000	0	Dokuman	-																										DIRAS PERBANKAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
			1.2.2.2	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah cakupan informasi yang dibenamkan. Aplikasi	5	Aplikasi	300.000.000	4	Aplikasi	211.344.300																											DIRAS PERBANKAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
			1.2.2.3	Pembangunan Tempat Parkir	Jumlah tempat parkir yang dibangun. Unit	10	Unit	220.000.000	1	Unit	39.896.000																											DIRAS PERBANKAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
			1.2.2.4	Publikasi dan Sosialisasi Kebijakan Investasi	Jumlah publikasi dan sosialisasi. Kali	16	Kali	400.000.000	16	Kali	259.755.730																												DIRAS PERBANKAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
			1.2.3	Program sosialisasi/pengembangan pelayanan masyarakat	persentase pengalokasian anggaran pelayanan masyarakat %	100	Persen	30.000.000	50	Persen	4.800.500																											DIRAS PERBANKAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
			1.2.2.1	Pembantuan unit kerja ke pangkalan pelayanan masyarakat	Prosentase pengalokasian anggaran pelayanan masyarakat yang dibenamkan. Kali	100	Kali	30.000.000	4	Kali	4.800.500																												DIRAS PERBANKAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	Meningkatkan kegiatan investasi	Meningkatkannya realisasi investasi	2.18.06	PROGRAM PENGALOKASIAN DANA DAN SISTEM INFORMASI PERBANKAM MODAL	Pemertase data dan informasi yang dibenamkan	90	Persen	599.900.500				90	Persen	59.900.500	0	Persen	-	0	Persen	2.400.000	0	Persen	1.000.000	90	Persen	56.267.000	90	Persen	59.667.000	100.00	99.61	90	Persen	59.667.000	100	10	DIRAS PERBANKAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
			2.18.06	Pengalokasian Dana dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah aplikasi pengelolaan data yang dibenamkan. Aplikasi	90	Aplikasi	599.900.500				2	Aplikasi	59.900.500	0	Aplikasi	-	0	Aplikasi	2.400.000	0	Aplikasi	1.000.000	2	Aplikasi	56.267.000	2	Aplikasi	59.667.000	100.00	99.61	2	Aplikasi	59.667.000	2	10	DIRAS PERBANKAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
			2.18.06	Pengalokasian Dana dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha/Elektrograsi secara Elektronik	Jumlah aplikasi pengalokasian data yang dibenamkan. aplikasi	6	Aplikasi	599.900.500				2	Aplikasi	59.900.500	0	Aplikasi	-	0	Aplikasi	2.400.000	0	Aplikasi	1.000.000	2	Aplikasi	56.267.000	2	Aplikasi	59.667.000	100.00	99.61	2	Aplikasi	59.667.000	33	10	DIRAS PERBANKAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/kegiatan, Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Rencana SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana SKPD sampai dengan Rencana SKPD Tahun Lalu	Target Kinerja dan anggaran Rencana SKPD Tahun berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Trivium																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana SKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
									I			II			III			IV			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7x100		14 = 6 + 12			15 = 14/6 x100				
									8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7x100		14 = 6 + 12			15 = 14/6 x100				
									Volume	K	Rp	Volume	K	Rp	Volume	K	Rp	Volume	K	Rp	Volume	K	Rp	Volume		K	Rp	Volume	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5				-7																-19									
	Meningkatnya jabatan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	1.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi dan Penkelolaan	Indikator: Kapasitas manajerial Angket	80	Angket	1.605.000.000	80	Angket	1.611.275.734														DINAS PERBENTAHAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
		1.1.1.1	Pelayanan Dinas: Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dibelanjakan Bulan	24	Bulan	500.000.000	24	Bulan	312.630.961															DINAS PERBENTAHAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
		1.1.1.2	Survey Kapasitas Masyarakat	Jumlah dokumen survey Kapasitas Masyarakat Dokumen	2	Dokumen	55.000.000	2	Dokumen	42.778.800															DINAS PERBENTAHAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
		1.1.1.3	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi pemerintahan Bulan	24	Bulan	1.050.000.000	24	Bulan	1.455.665.933																DINAS PERBENTAHAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
		2.1.2	Program Peningkatan Sistem dan Pemasaran Aparatur	persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi %	90	Persenan	2.020.000.000	40	Persenan	2.082.603.491																DINAS PERBENTAHAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
		2.1.2.1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pengadaan Unit	5	Unit	100.000.000	5	Unit	99.350.000																DINAS PERBENTAHAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
		2.1.2.2	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun Unit	1	Unit	600.000.000	0	Unit	-																DINAS PERBENTAHAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
		2.1.2.3	Pengadaan Pengkondisian Kantor	Jumlah pengkondisian kantor yang pengadaan Unit	100	Unit	800.000.000	210	Unit	1.182.230.200																	DINAS PERBENTAHAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
		2.1.2.4	Rahat/hibat/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan gedung kantor Gedung	3	Gedung	230.000.000	6	Gedung	844.474.300																	DINAS PERBENTAHAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
		2.1.2.5	Pemeliharaan Pengkondisian Kantor	Jumlah pemeliharaan pengkondisian kantor Kabi	24	Kabi	130.000.000	423	Kabi	107.148.500																	DINAS PERBENTAHAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
		2.1.2.6	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kabi	26	Kabi	160.000.000	28	Kabi	151.400.491																	DINAS PERBENTAHAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
		3.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase aparatur yang mendapatkan paksaan dinas %	100	Persenan	70.000.000	100	Persenan	194.185.000																	DINAS PERBENTAHAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
		3.1.3.1	Pengawasan paksaan khusus hari-hari tertentu	Jumlah paksaan khusus hari-hari tertentu Sta	80	Sta	70.000.000	275	Sta	194.185.000																	DINAS PERBENTAHAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
		4.1.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase aparatur yang mendapat sertifikasi kompetensi %	100	Persenan	125.000.000	100	Persenan	35.013.400																	DINAS PERBENTAHAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
		4.1.4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Orang	20	Orang	65.000.000	0	Orang	-																	DINAS PERBENTAHAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
		4.1.4.2	Biayabinaan teknik/pendidikan paramadani/undangan	Jumlah peserta bimbingan teknik Orang	80	Orang	60.000.000	40	Orang	35.013.400																	DINAS PERBENTAHAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						

NO	Tujuan	Sesuai	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/Output, Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Rencana SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana SKPD sampai dengan Rencana SKPD Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD Tahun Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Trivulsa																Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana SKPD s/d tahun 2021 (%)	Unit OPD Penanggung Jawab												
									I				II				III				IV						12 = 8+9+10+11			13 = 12/7x100			14 = 6 + 12			15 = 14/5 x100		
									K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp				K		Rp		K		Rp		K		Rp	
									Volume	Satuan			Volume	Satuan			Volume	Satuan			Volume	Satuan					Volume	Satuan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	-1	-2	-3	-4	-5		-18		-7		-8																	-19										
				5.1.5	Program Penyiapan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keunggulan Peringkat Daerah	persentase penyediaan dokumen perencanaan, serta pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu. %	100	Persent	90.000.000	100	Persent	64.999.500																	DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
				5.1.5.1	Penyusunan Laporan Keunggulan Peringkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dikurum. Dokumen	4	Dokumen	40.000.000	4	Dokumen	33.089.500																	DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
				5.1.5.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Peringkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Peringkat Daerah yang dikurum. Dokumen	13	Dokumen	50.000.000	13	Dokumen	31.910.000																	DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
				2.18.01	PROGRAM PENUNJANG UTUK PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	Angka	22.994.000.000			80	Angka	5.308.026.667	Angka	520.358.575	Angka	1.368.553.090	Angka	1.091.212.354	Angka	1.389.488.119	86,51	Angka	4.369.612.138	108,14	82,32	87	Angka	4.369.612.138	108,1	19	DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
				2.18.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan dokumen	8	Dokumen	230.000.000			1	Dokumen	19.970.825	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	Dokumen	16.720.000	1	Dokumen	2.480.000	1	Dokumen	19.200.000	100,00	96,14	1	Dokumen	19.200.000	13	8	DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
				2.18.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Peringkat Daerah yang dikurum. Dokumen	5	Dokumen	110.000.000			0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
				2.18.01	Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	Jumlah dokumen survey kepuasan Masyarakat Dokumen	3	Dokumen	120.000.000			1	Dokumen	19.970.825	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	16.720.000	0	Dokumen	2.480.000	1	Dokumen	19.200.000	100,00	96,14	1	Dokumen	19.200.000	32	16	DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
				2.18.01	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen	51	Dokumen	10.875.000.000			12	Dokumen	3.177.843.120	3		384.680.127	5	Dokumen	857.636.288	3	Dokumen	606.387.374	3	Dokumen	683.289.923	14	Dokumen	2.531.993.712	116,67	79,68	14	Dokumen	2.531.993.712	27	23	DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
				2.18.01	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji Pegawai dokumen	45	Dokumen	10.800.000.000			14	Dokumen	3.177.843.120	3	Dokumen	384.680.127	5	Dokumen	857.636.288	3	Dokumen	606.387.374	3	Dokumen	683.289.923	14	Dokumen	2.531.993.712	100,00	79,68	14	Dokumen	2.531.993.712	31	23	DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
				2.18.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan SKPD yang dikurum. Dokumen	6	Dokumen	75.000.000			0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
				2.18.01	Administrasi Kepegawaian Peringkat Daerah	Jumlah aparatur yang mengahiri pendidikan dan pelatihan Orang	12	Orang	220.000.000			55	Orang	39.983.000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	0	55	Orang	39.019.690	100,00	97,59	55	Orang	39.019.690	458	18	DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
					Pengadaan Paket Dana Bantuan	Jumlah paket dana hasil pengadaan Stas	120	ctab	100.000.000			0	ctab	-	0	ctab	-	0	ctab	-	0	ctab	-	-	ctab	-	-	ctab	-	-	-	-	-	DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				

NO	Tujuan	Sesama	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja & Tujuan, Sasaran, Program/kegiatan, Kegiatan (urutan), Sub Kegiatan	Target Renstra SIGPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SIGPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SIGPD sampai dengan Renja SIGPD Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja SIGPD Tahun Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triswala																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SIGPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SIGPD s/d Tahun Pelaksanaan Renja SIGPD	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SIGPD s/d Tahun 2021 (%)	Unit OPD Penanggung Jawab							
									I			II			III			IV			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7x100						14 = 6 + 12			15 = 14/5 x100			
									8			9			10			11			12			13						14		15				
									Volume	Setoran	Rp	Volume	Setoran	Rp	Volume	Setoran	Rp	Volume	Setoran	Rp	Volume	Setoran	Rp	Volume						Setoran	Rp	K	Rp	Volume	Setoran	Rp
-1	-2	-3	-4	-5				-6																			-19									
	2.18.01		Revisi dan Pemeliharaan	Jumlah peserta pelatihan	120	Orang	120.000.000		55	Orang	39.983.000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	39.019.690	55	Orang	39.019.690	100,00	97,89	55	Orang	39.019.690	46	33	DINAS PERHAMBANGAN MODAL DAIRY PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
	2.18.01		Administrasi Umum	Jumlah penyelesaian administrasi umum	12	Bulan	7.715.000.000		12	Bulan	1.086.020.722	3	Bulan	15.253.332	3	Bulan	325.353.714	3	Bulan	90.474.615	3	Bulan	396.185.715	12	Bulan	827.267.376	100,00	76,17	12	Bulan	827.267.376	100	11	DINAS PERHAMBANGAN MODAL DAIRY PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01		Penyediaan	Jumlah penyediaan komponen	36	Bulan	130.000.000		12	Bulan	17.814.380	3	Bulan	-	3	Bulan	9.848.530	3	Bulan	4.842.300	3	Bulan	3.123.550	12	Bulan	17.814.380	100,00	100,00	12	Bulan	17.814.380	33	14	DINAS PERHAMBANGAN MODAL DAIRY PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01		Penyediaan	Jumlah penyediaan Perakitan dan Perakitan Kantor	180	Unit	6.400.000.000		61	Unit	860.898.080	0	Unit	608.500	29	Unit	212.642.560	3	Unit	57.951.215	29	Unit	335.411.265	61	Unit	606.614.140	100,00	70,46	61	Unit	606.614.140	38	9	DINAS PERHAMBANGAN MODAL DAIRY PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01		Penyediaan	Jumlah penyediaan Perakitan Rumah Tangga	36	Bulan	140.000.000		12	Bulan	59.819.562	3	Bulan	-	3	Bulan	38.809.950	3	Bulan	12.559.000	3	Bulan	7.006.450	12	Bulan	58.375.400	100,00	97,55	12	Bulan	58.375.400	32	42	DINAS PERHAMBANGAN MODAL DAIRY PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01		Penyediaan	Jumlah penyediaan Bahan Logik Kantor	36	Bulan	530.000.000		12	Bulan	55.475.700	3	Bulan	-	3	Bulan	12.415.450	3	Bulan	11.925.500	3	Bulan	28.560.600	12	Bulan	52.901.550	100,00	95,36	12	Bulan	52.901.550	32	10	DINAS PERHAMBANGAN MODAL DAIRY PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01		Penyediaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	36	Bulan	55.000.000		12	Bulan	9.998.500	0	Bulan	-	3	Bulan	6.953.000	3	Bulan	1.026.000	3	Bulan	1.864.500	9	Bulan	9.823.800	75,00	98,25	9	Bulan	9.823.500	25	16	DINAS PERHAMBANGAN MODAL DAIRY PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01		Penyediaan	Jumlah penyediaan Bahan Eksem dan Peraturan Perundang-undangan	36	Bulan	35.000.000		12	Bulan	9.994.500	3	Bulan	1.240.000	3	Bulan	2.190.000	3	Bulan	2.190.000	3	Bulan	4.120.000	12	Bulan	9.740.000	100,00	97,45	12	Bulan	9.740.000	32	28	DINAS PERHAMBANGAN MODAL DAIRY PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01		Penyediaan	Jumlah penyediaan Laporan dan Dokumentasi SIGPD	36	Bulan	425.000.000		12	Bulan	72.000.000	3	Bulan	13.404.832	3	Bulan	42.484.234	3	Bulan	-	3	Bulan	16.099.350	12	Bulan	71.998.406	100,00	100,00	12	Bulan	71.998.406	32	17	DINAS PERHAMBANGAN MODAL DAIRY PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01		Penyediaan	Jumlah penyediaan jasa penunjang	36	Bulan	2.889.000.000		12	Bulan	655.224.000		Bulan	105.263.560	3	Bulan	152.843.678		Bulan	156.835.027		Bulan	218.490.796	3	Bulan	633.433.061	25,00	96,67	3	Bulan	633.433.061	8	22	DINAS PERHAMBANGAN MODAL DAIRY PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01		Penyediaan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi	36	Bulan	900.000.000		12	Bulan	162.000.000	3	Bulan	36.838.798	3	Bulan	36.399.242	3	Bulan	34.885.401	3	Bulan	44.881.628	12	Bulan	152.605.069	100,00	94,20	12	Bulan	152.605.069	32	17	DINAS PERHAMBANGAN MODAL DAIRY PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01		Penyediaan	Jumlah penyediaan Perakitan dan Perakitan Kantor	152	Unit	249.000.000		50	Unit	38.556.000	6	Unit	1.460.000	14	Unit	3.999.810	15	Unit	9.705.000	15	Unit	22.703.000	50	Unit	37.867.810	100,00	98,22	50	Unit	37.867.810	32	15	DINAS PERHAMBANGAN MODAL DAIRY PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01		Penyediaan	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	36	Bulan	1.740.000.000		12	Bulan	484.668.000	3	Bulan	66.964.762	3	Bulan	112.444.626	3	Bulan	112.444.626	3	Bulan	151.106.168	12	Bulan	442.960.182	100,00	97,42	12	Bulan	442.960.182	32	25	DINAS PERHAMBANGAN MODAL DAIRY PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01		Pembelian	Jumlah pembelian barang milik daerah	45	Unit	1.065.000.000		16	Unit	328.985.000	2		15.161.556	5	Unit	32.719.410	5	Unit	220.795.338	4	Unit	50.021.995	16	Unit	318.698.299	100,00	96,87	16	Unit	318.698.299	36	30	DINAS PERHAMBANGAN MODAL DAIRY PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		

NO	Tujuan	Seseran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Seseran, Program (output), Sub Kegiatan	Target Renstra/SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja/SKPD Tahun Lalu	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Trivulsa																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD a/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD a/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab						
									I				II				III				IV					12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12			15 = 14/8 x100					
									K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp			K		Rp		K			Rp		K		Rp	
									Volume	Setoran	Volume	Setoran	Volume	Setoran	Volume	Setoran	Volume	Setoran	Volume	Setoran	Volume	Setoran	Volume	Setoran		Volume	Setoran	Volume	Setoran	Volume	Setoran		Volume	Setoran	Volume	Setoran	Volume	Setoran
	-1	-2	-3	-4	-5			-7	-8																											-19		
			2.18.01	Pembelian Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Operasional atau Layanan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, yang dikeluarkan an. pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau layanan Kendaraan	42	Unit	265.000.000				14	Unit	72.000.000	2	Unit	15.161.556	5	Unit	15.995.430	4	Unit	11.545.338	3	Unit	25.945.995	14	Unit	68.648.299	100,00	94,56	14	Unit	68.648.299	33	26	DINAS PERBENDAHAWAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2.18.01	Pembelian/Mobilisasi/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya. Gedung	3	Gedung	800.000.000				2	Gedung	256.385.000	0	Gedung	-	0	Gedung	16.724.000	1	Gedung	209.250.000	1	Gedung	24.076.000	2	Gedung	290.090.000	100,00	97,53	2	Gedung	250.050.000	67	31	DINAS PERBENDAHAWAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
								30.553.900.500						6.172.883.517			539.546.667			1.475.546.662			1.137.027.454			4.954.014.247		100,00	80,25			4.954.014.247	59,26	16,21	DINAS PERBENDAHAWAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			

2.2 Telaah terhadap hasil pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra, akan diketahui realisasi program atau kegiatan baik yang memenuhi target kinerja yang direncanakan maupun yang tidak memenuhi target kinerja. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengukur sampai dimana keberhasilan kinerja OPD berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja dan pencapaian anggaran pelaksanaan renja tahun lalu menunjukkan bahwa Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota belum memenuhi target capaian kinerja. Hal ini disebabkan karena masih dalam pandemi covid 19 sehingga sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal belum bisa terlaksana secara maksimal.

Dinas Penanaman Modal dalam mendorong investor melakukan LKPM dan memberikan iklim penanaman modal yang kondusif serta dalam hal urusan PTSP perlu mengoptimalkan pengendalian penanaman modal yang meliputi pemantauan penanaman modal, pembinaan penanaman modal dan pengawasan penanaman modal, meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi, proses pelayanan terpadu Mal Pelayanan Publik baik melalui OSS ataupun aplikasi SIMPADU, Perlu meningkatkan sarana dan prarana di lantai 3 Mal Pelayanan Publik dan Perlu pengembangan atau pengintegrasian aplikasi . Dengan demikian beberapa program yang akan menjadi konsentrasi DPMPTSP adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran dan hasil penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/proses/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan/atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja DPMPTSP dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2023.

- Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;
- Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada APBD Kabupaten tahun anggaran 2021, DPMPTSP telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 2 (dua) sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

- Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
- b. 76% sampai 100% = Baik (B)
- c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Kinerja DPMPSTSP Kabupaten Magetan diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan untuk mengetahui gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja sasaran dilakukan melalui media kinerja terutama yang kemudian dibandingkan dengan realisasi. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator – indikator masukan, keluaran, data hasil, mengukur, kehematan, efektifitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode sesuai tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja.

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

No	Indikator	SPM Standar Nasional	IK K	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2023 (Thn n+1)	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2023(Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai realisasi investasi			250.M	300.M	400.M	450 M	709.5 M	1,136 M	1.140 M	1.145 M	
2	Jumlah investor.			450	875	1120	1380	2983	4392	3000	3100	
3.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.			78	79	80	81	82.94	83,96	83	83	
4.	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani..			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh DPMPSTSP Kabupaten Magetan. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh 3 factor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran DPMPSTSP Kabupaten Magetan. Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran DPMPSTSP Kabupaten Magetan.

Isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2018-2023 disusun berdasarkan beberapa sumber, pertama berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan Penanaman Modal di Kabupaten Magetan. Kedua bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018. Ketiga didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan rencana kerja dan rencana strategis periode sebelumnya, sehingga dapat diidentifikasi

berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2018-2023.

Permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Magetan diantaranya sebagai berikut :

1. Optimalisasi layanan online terintegrasi dan operasionalisasi penyelenggaraan mal pelayanan publik
2. Penyempurnaan sistem OSS sesuai dengan perkembangan
3. Insentif penanaman modal untuk investor baru. Insentif penanaman modal berupa pengurangan dan atau pembebasan pajak daerah serta pengurangan dan atau pembebasan retribusi daerah.
4. Penyelenggaraan promosi investasi dan pemetaan potensi investasi yang belum optimal
5. Masih terbatasnya data informasi mengenai pengembangan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah menjadi Potensi Investasi Regional melalui data potensi penanaman modal
6. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan yang didukung oleh e-service
7. Belum Optimalnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
8. Belum optimalnya upaya fasilitasi usaha mikro dan kecil
9. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan Kegiatan Penanaman Modal sehingga mempengaruhi nilai investasi.
10. Belum optimalnya pemanfaatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang penanaman modal

2.3.1. Tantangan

Untuk itu perlu diuraikan tantangan dan peluang demi pengembangan pelayanan tersebut. Tantangan kedepan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai berikut:

1. Kondisi pandemi COVID-19 yang belum diketahui sampai kapan berakhirnya berdampak pada pencapaian realisasi investasi
2. Semakin tingginya harapan masyarakat terhadap peran investasi dalam memecahkan permasalahan pengangguran dan upaya pemerataan pembangunan.
3. Belum kondusifnya iklim investasi yang menyangkut perbaikan di bidang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, perbaikan pelayanan dan penyederhanaan birokrasi, efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas.
4. Potensi daerah lain yang tidak kalah menarik yang berusaha menarik investor ke daerahnya.
5. Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah terkait dalam mendukung pencapaian tujuan membuka peluang Investasi.
6. Semakin tingginya harapan masyarakat atas kualitas pelayanan publik.
7. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi.

2.3.2. Peluang

Adapun peluang bagi pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yaitu :

1. Potensi investasi yang melimpah.
2. Terjalannya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Magetan.
3. Terbukanya peluang dan kesempatan dari Pemerintah Pusat/Provinsi untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan, dengan mengikuti jenjang pendidikan formal, bintek, workshop maupun seminar.
4. Terbukanya peluang kerjasama antar pemerintah daerah, instansi pemerintah dan dunia usaha.
5. Semakin terbukanya peluang kerjasama antar daerah untuk pengelolaan potensi ekonomi strategis.
6. Kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung percepatan investasi dan penyederhanaan pelayanan perizinan.
7. Regulasi yang memungkinkan daerah memberikan insentif kepada investor.
8. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan terjangkau, sehingga dapat dimanfaatkan untuk penerapan e-government dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
9. Terselenggaranya Mal Pelayanan Publik yang merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasad/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada DPMPTSP Kabupaten Magetan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Magetan. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada DPMPTSP Kabupaten Magetan. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan dalam tabel 2.3

Tabel 23
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Magetan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	5 dokumen	15.000.000	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	5 dokumen	15.000.000	

	b Evaluasi Kinerja . Perangkat Daerah	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat.	1 dokumen	20.000.000	b Evaluasi Kinerja . Perangkat Daerah	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat.	1 dokumen	20.000.000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.904.188.041	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.904.188.041	
	b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun.	2 dokumen	15.000.000	b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun.	2 dokumen	15.000.000	
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					

	a Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah peserta bimbingan teknis	47oran g	55.000.000	b Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Semua Kabupate n / Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Jumlah peserta bimbingan teknis	47 orang	55.000.000	
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah penyediaa n komponen instalasi listrik peneranga n bangunan kantor	12 bulan	25.000.000	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Semua Kabupate n / Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	12 bulan	25.000.000	
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaa n Peralatan dan Perlengka pan Kantor	12 Bulan	400.000.000	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupate n / Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	12 Bulan	400.000.000	

c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	40.000.000	c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	40.000.000
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	70.000.000	d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	70.000.000
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	50.000.000	e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	50.000.000
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bulan	10.000.000	f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bulan	10.000.000

	g Penyelenggaraan . Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	12 bulan	105.000.000	g Penyelenggaraan . Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	12 bulan	105.000.000	
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	a Penyediaan Jasa . Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	210.000.000	a Penyediaan Jasa . Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	210.000.000	0
	b Penyediaan Jasa . Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	80.000.000	b Penyediaan Jasa . Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	80.000.000	

	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	535.000.000	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	535.000.000	
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	85.000.000	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	85.000.000	
	b Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor dan	1 gedung	298.700.000	b Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya.	1 gedung	298.700.000	

			bangunan lainnya.				Kelurahan				
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				
2.1	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan :						Sub Kegiatan :				
	a Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen evaluasi Kajian penanaman Modal	1 dokumen	10.000.000		a Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen evaluasi Kajian penanaman Modal	1 dokumen	10.000.000
3	Program Promosi Penanaman Modal						Program Promosi Penanaman Modal				

3.1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen kajian strategi promosi	1 Dokumen	85.000.000	b. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen kajian strategi promosi	1 Dokumen	85.000.000	
	b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pameran investasi	8 kali	550.000.000	a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pameran investasi	8 kali	550.000.000	
4	Program Pelayanan Penanaman Modal					Program Pelayanan Penanaman Modal					
4.1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan					Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan					

Daerah Kabupaten/ Kota					Daerah Kabupaten/ Kota					
Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
a Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapat kan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegra si Secara Elektronik	1120 Pelaku usaha	115.000.000	a Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kabupate n / Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatk an Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1120 Pelaku usaha	115.000.000	
b Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantau	24 Kegiata n usaha	20.000.000	b Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Semua Kabupate n / Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantau an Pemenuhan	24 Kegiata n usaha	20.000.000	

		an Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal					Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal			
c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12 Orang	10.000.000	d. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12 Orang	10.000.000	

	d Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah anggota forum komunikasi PTSP	20 orang	10.000.000	c Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah anggota forum komunikasi PTSP	20 orang	10.000.000	
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
5.1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	a Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	12 dokumen	40.000.000	a Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	12 dokumen	40.000.000	
	b Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta rakor	200 orang	160.000.000	b Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta rakor	200 orang	160.000.000	

							Kelurahan				
	c Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	12 dokumen	20.000.000	c Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	12 dokumen	20.000.000	
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal					Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal					
6.1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					

a	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah sistem informasi yang dikembang kan	2 Aplikas i	50.000.000	a	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kabupate n / Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Jumlah sistem informasi yang dikembang kan	2 Aplikas i	50.000.000	
TOTAL					4.992.888.04 1	TOTAL					4.992.888.04 1	

2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan musrenbang tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang menunjang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana disajikan dalam tabel T.C. 3.2

Tabel T.C 32
Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Magetan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program kegiatan /	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Investasi merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan dalam rangka untuk menambah barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang sudah ada supaya menambah jumlah produksi. Penanaman modal dalam bentuk investasi ini dapat berasal dari dua sumber, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri. Investasi yang naik dari tahun ketahun akan menyebabkan penyerapan angkatan kerja yang bekerja akan semakin besar karena dengan tingginya investasi maka proses produksi naik dan semakin banyak membutuhkan angkatan kerja.

Salah satu faktor untuk menaikkan pembangunan daerah adalah dengan tersedianya modal dalam bentuk investasi. Ketiadaan modal dalam pembangunan merupakan faktor penghambat terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Salah satu dari ciri negara sedang berkembang adalah tidak adanya modal yang mencukupi untuk pembangunan.

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan proses perizinan yang lebih sederhana dalam proses penanaman investasi. Hal ini diharapkan dapat membuat iklim investasi di Indonesia menjadi semakin kondusif.

Di Indonesia, kelembagaan, keamanan, ekonomi lokal, ketenagakerjaan dan infrastruktur menjadi faktor-faktor yang memberatkan investasi. Kelembagaan disini termasuk didalamnya pelayanan perizinan.

Salah satu langkah nyata reformasi di sektor perizinan adalah dengan melakukan pembenahan pada institusi yang sebelumnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan perijinan. Bentuk nyatanya antara lain dengan diperkenalkannya sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagai jawaban atas kelambanan prosedur selama ini akibat terlampau banyaknya meja birokrasi yang harus dilalui ketika mengurus sebuah perizinan.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai sebuah institusi pelayanan terpadu satu pintu sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang meliputi semua jenis perizinan dan nonperizinan yang akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus dapat memberikan kemudahan dalam berinvestasi.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Melalui OSS tersebut, pelaku usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara

terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha mengamanatkan antara lain terkait penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) di daerah untuk percepatan kemudahan berusaha dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan dan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri nomor 503/4033/SJ, bahwa daerah agar mendukung kesiapan PTSP kabupaten/kota dalam menghadapi implementasi program *Online Single Submission* (OSS) tersebut. rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dan penyederhanaan pelayanan dengan penggunaan tanda tangan digital untuk seluruh jenis layanan sehingga penyelesaian layanan menjadi lebih cepat, lebih transparan, lebih mudah dan lebih akurat tanpa terkendala oleh batasan proses, ruang, dan waktu

Reformasi birokrasi saat ini mendorong perubahan tata kelola pemerintahan agar dapat menghadirkan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas yang baik. Pemerintah sebagai representasi publik harus membangun institusi publik yang berintegritas, responsif dan baik dalam pengelolaan kebijakan publik. Kebijakan publik harus adaptif, fokus program pemerintah perlu berganti secara berkelanjutan sebab saat ini perubahan terjadi begitu dinamis.

Salah Satu perubahan dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan melalui penyederhanaan pelayanan dengan penerapan penggunaan tanda tangan digital untuk seluruh jenis layanan, pemberian kemudahan pelayanan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelayanan. Sehingga penyelesaian layanan menjadi lebih cepat, lebih transparan, lebih mudah dan lebih akurat tanpa terkendala oleh batasan proses, ruang, dan waktu.

Sesuai dengan perkembangan yang ada, pemerintahan saat ini telah menjalankan sistem pemerintahan terbuka, dimana keinginan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemerintahan sangat besar. Melalui kerangka kerja ini maka pemerintah membuat kebijakan Mal Pelayanan Publik yang lebih progresif menyatukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam satu tempat.

Berdasarkan fakta yang ada, daerah yang telah memiliki Mal Pelayanan Publik diharapkan pertumbuhannya akan berkembang secara pesat. Sebab semua proses pelayanan public dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis.

Penetapan tujuan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah meningkatnya investasi yang berdaya saing, guna meningkatkan perekonomian daerah dan Terselenggaranya pelayanan terpadu satu pintu yang prima.

1.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh badan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan adalah suatu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan telah merumuskan sasaran berikut indikator keberhasilannya. DPMPTSP Kabupaten Magetan merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu :

1. Meningkatnya realisasi investasi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.

TABEL TC. 2

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-						
				2019	2020	2021	2022	2023		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Meningkatnya kegiatan investasi			01.01	Nilai investasi	190 Milyar Rp	220 Milyar Rp	300 Milyar Rp	400 Milyar Rp	450 Milyar Rp
				01.02	Jumlah investor	435 Investor	450 Investor	875 Investor	1120 Investor	1380 Investor
		01.01	Meningkatnya realisasi investasi.	01.01.01	Nilai investasi.	220.000.000.000	250.000.000.000	300.000.000.000	400.000.000.000	450.000.000.000
				01.01.02	Jumlah investor.	435 Investor	450 Investor	875 Investor	1120 Investor	1380 Investor
		01.02	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	01.02.01	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	78,000 Angka	79,000 Angka	80,000 Angka	81,000 Angka	82,000 Angka
				01.02.02	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Rencana Program dan Kegiatan pada DPMPSTSP Kabupaten Magetan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan'
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
 - 2.1 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

 - a. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
 - 3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

 - a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - 4.1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

 - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 5.1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - 6.1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

 - a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan sebagaimana disajikan dalam Tabel TC 33.

Tabel T.C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				4.955.694.685				5.835.188041
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				4.955.694.685				5.835.188041
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat		Skor 83	3.880.694.683				4.105.188.041
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		6 Dokumen	35.000.000			7 Dokumen	70.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	5 dokumen	15.000.000	DAU		5 dokumen	20.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	1 dokumen	20.000.000	DAU	Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang	2 dokumen	50.000.000

							Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pada Pasal 1 bahwa Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan keuangan		2 Dokumen	1.919.188.041			2 Dokumen	1.919.188.041
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP Kabupaten Magetan	12 Bulan	1.881.994.683	DAU		12 Bulan	1.904.188.041
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan /triwulanan/ semesteran yang disusun.	DPMPTSP Kabupaten Magetan	2 dokumen	15.000.000	DAU		2 dokumen	20.000.000

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		48 orang	55.000.000			48 orang	96.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas hasil pengadaan	DPMPPTSP Kabupaten Magetan			DAU	Pakaian Dinas Khusus Petugas Pelayanan	48 orang	36.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	48 orang	55.000.000	DAU		48 orang	60.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan pelayanan administrasi perkantoran		12 bulan	700.000.000				895.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	12 bulan	25.000.000	DAU		12 bulan	35.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	12 Bulan	400.000.000	DAU		12 Bulan	500.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	12 bulan	40.000.000	DAU		12 bulan	50.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	12 bulan	70.000.000	DAU		12 bulan	85.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	12 bulan	50.000.000	DAU		12 bulan	60.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah	DPMPPTSP	12 bulan	10.000.000	DAU		12 bulan	15.000.000

	dan Peraturan Perundang-undangan	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kabupaten Magetan						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	DPMPTSP Kabupaten Magetan	12 bulan	105.000.000	DAU		12 bulan	150.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, pemeliharaan peralatan kantor, dan penyediaan pelayanan umum kantor		12 bulan	820.000.000				880.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	DPMPTSP Kabupaten Magetan	12 bulan	205.000.000	DAU		12 bulan	250.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	DPMPTSP Kabupaten Magetan	12 bulan	80.000.000	DAU		12 bulan	85.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DPMPTSP Kabupaten Magetan	12 bulan	535.000.000	DAU		12 bulan	545.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		12 Bulan	388.700.000				245.000.000
	Penyediaan Jasa	Jumlah	DPMPTSP	12 bulan	90.000.000	DAU		12 bulan	95.000.000

	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	penyediaan jasa pemeliharaan, biayapemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraandinas operasional atau lapangan	Kabupaten Magetan						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya.	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	2 gedung	298.700.000	DAU		2 gedung	150.000.000
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun		100%	10.000.000				300.000.000
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	1 dokumen	10.000.000	DAU		-	-
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian penanaman modal	DPMPPTSP Kabupaten Magetan					-	-
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen evaluasi Kajian penanaman Modal	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	1 dokumen	10.000.000	DAU		-	-
	Pembuatan Peta Potensi	Jumlah peta						2 Dokumen	300.000.000

	Investasi Kabupaten/Kota	potensi investasi yang disusun							
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal						1 Dokumen	150.000.000
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi yang disusun.						1 Dokumen	150.000.000
	Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan potensi yang dipromosikan		100%	595.000.000				735.000.000
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran investasi dan Jumlah publikasi dan sosialisasi		8 kali	595.000.000			8 Kali	735.000.000
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian strategi promosi	DPMPTSP Kabupaten Magetan	1 Dokumen	85.000.000	DAU		1 Dokumen	85.000.000
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran investasi, publikasi dan sosialisasi	DPMPTSP Kabupaten Magetan	8 kali	510.000.000	DAU		8 kali	650.000.000
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.		100 %	200.000.000				290.000.000
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	DPMPTSP Kabupaten Magetan	1120 Pelaku usaha	200.000.000				290.000.000
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan dan	DPMPTSP Kabupaten Magetan	1120 Pelaku usaha	155.000.000	DAU		1200 Pelaku usaha	180.000.000

	Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	kegiatan penguatan mutu pelayanan							
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan.	DPMPTSP Kabupaten Magetan	24 Kegiatan usaha	20.000.000	DAU		24 Kegiatan usaha	20.000.000
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah penyelenggaraan layanan pengelolaan pengaduan	DPMPTSP Kabupaten Magetan	12 Orang	10.000.000	DAU		24 Orang	40.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah anggota forum komunikasi PTSP	DPMPTSP Kabupaten Magetan	20 orang	10.000.000	DAU		50 orang	50.000.000
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal		100 Persen	220.000.000				330.000.000
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian penanama modal		24 Dokumen	220.000.000				330.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	DPMPTSP Kabupaten Magetan	12 dokumen	40.000.000	DAU		12 dokumen	40.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta bimbingan teknis	DPMPTSP Kabupaten Magetan	200 orang	160.000.000	DAU		200 orang	260.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	DPMPTSP Kabupaten Magetan	12 dokumen	20.000.000	DAU		12 dokumen	30.000.000

	Modal								
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi yang dikembangkan		100 Persen	50.000.000				75.000.0000
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pengelolaan data yang dikembangkan		2 Aplikasi	50.000.000			2 Aplikasi	75.000.000
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	DPMP TSP Kabupaten Magetan	2 Aplikasi	50.000.000	DAU		2 Aplikasi	75.000.000
					4.955.694.683				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan sesuai dengan usulan Program Kegiatan Tahun 2023 pada aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4.1

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Magetan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	18						4,955,694,683							0	
2	18	01					3,880,694,683					80 Skor		0	
2	18	01	2.01				35,000,000							0	
2	18	01	2.01	01			5 Dokumen	15,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi	5 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	07			1 Laporan	20,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi	1 Laporan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02					1,881,994,683						0	
2	18	01	2.02	01			28 Orang/bulan	1,866,994,683			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi	28 Orang/bulan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	05			2 Laporan	15,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Memantapkan ketercukupan infrastruktur konektivitas antar wilayah untuk mendukung pertumbuhan pusat ekonomi baru dan pemerataan pembangunan	2 Laporan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.05					55,000,000						0	
2	18	01	2.05	11			47 Orang	55,000,000				1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi	47 Orang	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06					700,000,000						0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Magetan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,000,000					1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi		1 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	400,000,000					1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi		12 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	40,000,000					1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi		3 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	70,000,000					1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi		2 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50,000,000					1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi		1 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	10,000,000					1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi		12 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	105,000,000					1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi		12 Laporan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						820,000,000								0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Magetan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	205,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi	12 Laporan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	80,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi	12 Laporan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	535,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi	12 Laporan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						388,700,000						0		
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	90,000,000				1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi	15 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	298,700,000				1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi	2 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun	persen		persen	80 persen	10,000,000					80 persen	0		
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						10,000,000						0		
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah				1 Kegiatan Usaha	10,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi	1 Kegiatan Usaha	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan potensi yang dipromosikan	persen		persen	90 persen	595,000,000					90 persen	0		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Magetan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						595,000,000						0		
2 18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	85,000,000					1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				8 Dokumen	510,000,000					8 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.	persen		persen	100 persen	200,000,000					100 persen	0		
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						200,000,000						0		
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1120 Pelaku Usaha	155,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi	1120 Pelaku Usaha	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				24 Kegiatan Usaha	20,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi	24 Kegiatan Usaha	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				12 Orang	10,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi	12 Orang	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Magetan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				20 Kegiatan Usaha	15,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi	20 Kegiatan Usaha	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal	persen		persen	85 persen	220,000,000					85 persen	0		
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						220,000,000						0		
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				12 Kegiatan Usaha.	40,000,000				1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi	12 Kegiatan Usaha.	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				200 Pelaku Usaha	160,000,000				1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi	200 Pelaku Usaha	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				12 Kegiatan Usaha	20,000,000				1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi	12 Kegiatan Usaha	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi yang dikembangkan	persen		persen	95 persen	50,000,000					95 persen	0		
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50,000,000						0		
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	50,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Penguatan kembali stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi	1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
TOTAL							4,955,694,683						0		

B A B V

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan disusun berdasarkan hasil rumusan dan penyusunan prioritas kegiatan Tahun 2023 setelah memperhatikan perencanaan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023 serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memuat 6 (enam) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 28 (duapuluh delapan) Sub Kegiatan bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

Akhirnya, dengan telah disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan mewujudkan visi misi Kabupaten Magetan. Semoga Rencana Kerja ini dapat dijadikan acuan kerjanya bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dan umumnya bagi pihak-pihak yang terkait.

Magetan, 31 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MAGETAN



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 198809 2 001